Vol. 2 No. 3 Edisi September 2026 E.ISSN. 3109-855X

Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijosse/index
Email: admin@jurnalcenter.com

PERAN PUBLIC RELATIONS PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN INFORMASI PUBLIK (Studi Kasus Pemerintahan Desa Cigentur)

THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS IN ACHIEVING TRANSPARENCY AND PUBLIC INFORMATION (A Case Study of Cigentur Village Government)

Saepuloh[1*], Dadan Saputra[2], Aulia Asmarani[3], Yogi Alontarie[4]

[1*]International Women University, Email : Saepulohatmaja23@gmail.com
[2]International Women University, Email : dadan@iwu.ac.id
[3]International Women University, Email : aulia@iwu.ac.id
[4]International Women University, Email : yogiealontari@iwu.ac.id

*email koresponden: Saepulohatmaja23@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i3.3291

Abstrack

This study aims to examine and analyze the role of the Cigentur Village Government's Public Relations in fostering public information transparency. It employs a qualitative approach using a case study method. Data collection involved interviews, observation, and document analysis, with informants drawn from both the Cigentur Village Government and the local community. The findings indicate that the Cigentur Village Government's Public Relations plays a role in disseminating public information through various channels both in-person and digital such as outreach sessions, meetings, village deliberations (Musyawarah Desa), the "Friday Tour" (Jumat Keliling) program, billboards, WhatsApp groups, the official website, and Instagram. These diverse channels are utilized to accommodate the community's varying characteristics and information-seeking needs. Beyond merely disseminating information, the Cigentur Village Government also strives to establish two-way communication by providing avenues for residents to voice their aspirations and opinions, as well as to express their information needs.
Keywords: *Public Relations, Village Government, Public Information Transparency.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Public Relations Pemerintah Desa Cigentur dalam mewujudkan transparansi informasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri atas unsur Pemerintah Desa Cigentur dan masyarakat Desa Cigentur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Public Relations Pemerintah Desa Cigentur berperan dalam menyampaikan informasi publik melalui berbagai saluran komunikasi, baik

Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijosse/index
Email: admin@jurnalcenter.com

secara langsung maupun melalui media digital, seperti sosialisasi, rapat, Musyawarah Desa, kegiatan Jumat Keliling, baliho, grup WhatsApp, website, dan Instagram. Penggunaan berbagai saluran komunikasi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain menyampaikan informasi, Pemerintah Desa Cigentur juga berupaya membangun komunikasi dua arah dengan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kebutuhan informasi.
Kata Kunci: Public Relations, Pemerintah Desa, Transparansi Informasi Publik.

1. PENDAHULUAN

Transparansi dan keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, khususnya dalam pengelolaan anggaran Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti hambatan komunikasi, keterbatasan aksesibilitas, rendahnya literasi digital, serta minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum pengambilan keputusan seperti Musyawarah Desa. Kondisi ini sering kali memicu keraguan, miskomunikasi, dan persepsi negatif dari warga terhadap kredibilitas kinerja aparatur desa.

Guna mengatasi persoalan tersebut, fungsi *Public Relations* (PR) pemerintah hadir secara strategis sebagai jembatan komunikasi yang tidak hanya mendiseminasikan informasi secara searah, tetapi juga mengelola dialog dua arah yang simetris dan partisipatif sesuai konsep Grunig dan Hunt. Di era digital saat ini, pemanfaatan platform teknologi dan website desa—seperti yang diterapkan oleh Desa Cigentur sebagai peraih prestasi lomba website tingkat kabupaten—turut dioptimalkan untuk memperluas akses informasi publik, meskipun efektivitasnya tetap harus diiringi dengan mitigasi hambatan pemahaman di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian studi kasus di Desa Cigentur ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana aktivitas dan peran *Public Relations* pemerintah dijalankan dalam menyampaikan informasi secara transparan, komunikatif, dan kredibel. Melalui pengelolaan komunikasi yang terencana, pemerintah desa diharapkan mampu menjembatani hubungan yang harmonis, meningkatkan pemahaman warga, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa secara berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus untuk mendalami peran *Public Relations* Pemerintah Desa Cigentur dalam mewujudkan transparansi informasi publik. Melalui paradigma ini, realitas sosial dipandang terbentuk secara dinamis melalui pengalaman, pandangan, serta interpretasi individu, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi strategi komunikasi, pengelolaan informasi anggaran, hingga keragaman persepsi masyarakat secara kontekstual. Objek penelitian difokuskan pada aktivitas *Public Relations* desa, sementara subjek penelitian ditentukan secara purposif yang mencakup informan kunci dari unsur perangkat desa—seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kasi Pemerintahan—serta informan pendukung dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan anggota Karang Taruna.

Guna memperoleh data yang komprehensif dan mendalam, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi yang meliputi wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi non-partisipan, serta studi dokumentasi. Wawancara menggali informasi langsung dari komunikator dan komunikan mengenai proses penyampaian pesan dan respons warga, yang kemudian divalidasi melalui pengamatan langsung terhadap interaksi media digital, papan informasi fisik, dan dinamika sosial di ruang publik. Seluruh rangkaian pengumpulan data tersebut diperkuat dengan dokumentasi berupa foto kegiatan, tangkapan layar platform digital, dan arsip publikasi desa untuk menganalisis efektivitas serta hambatan komunikasi yang dihadapi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pemerintah Desa Cigentur, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, dengan pertimbangan objektif terkait transisi digital dan kendala literasi warga, upaya transparansi dan respons kritis masyarakat terhadap anggaran, integrasi komunikasi modern dengan

Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)
Journal page is available to https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijosse/index
Email: admin@jurnalcenter.com

budaya kultural tatap muka, serta keterbukaan pihak desa yang kooperatif terhadap riset akademis; sementara proses penelitiannya berlangsung secara intensif selama enam bulan, terhitung dari Desember 2025 hingga Juli 2026, guna memastikan seluruh rangkaian penggalian data dapat dilakukan secara padat, mendalam, dan efektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini secara komprehensif memaparkan hasil penelitian mengenai peran *Public Relations* Pemerintah Desa Cigentur, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, dalam mewujudkan transparansi informasi publik. Fokus utama kajian ini mencakup tiga hal esensial: bagaimana proses penyampaian informasi publik dilakukan, strategi komunikasi apa yang diterapkan, serta bagaimana bentuk respons Pemerintah Desa Cigentur terhadap aspirasi dan kebutuhan informasi masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data primer digali secara mendalam melalui wawancara langsung dengan narasumber yang relevan.

Proses pengumpulan data melibatkan delapan informan kunci dan pendukung untuk memastikan objektivitas dan kekayaan sudut pandang. Dari unsur pemerintah desa, informan terdiri atas H. Hidayat selaku Kepala Desa, Sidik Permana, S.Sos.i. selaku Sekretaris Desa, dan Lutfi Prama Rizki, S.AP. selaku Kasi Pemerintahan. Sementara dari unsur masyarakat, informan mencakup H. Wawan selaku tokoh masyarakat, Arif Nursetiawan dari Karang Taruna, Deden Dendi selaku warga umum, Rangga Subrata Dimyati sebagai warga yang aktif mengikuti Musyawarah Desa, serta Ibu Nani Setiawati sebagai warga yang tidak aktif menggunakan media sosial. Keragaman karakteristik ini sangat penting untuk memotret realitas di lapangan secara utuh.

Dalam menjalankan fungsi penyampaian informasi publik, Pemerintah Desa Cigentur tidak mengandalkan satu saluran tunggal, melainkan menerapkan strategi multisaluran yang memadukan media digital dan komunikasi langsung. Pemanfaatan platform digital seperti website desa, akun Instagram resmi, dan grup WhatsApp dioptimalkan untuk mempercepat penyebaran informasi kegiatan maupun program pembangunan kepada warga yang akrab dengan teknologi. Di sisi lain, komunikasi langsung tetap dipertahankan melalui rapat desa, sosialisasi, Musyawarah Desa (Musdes), dan kegiatan Jumat Keliling guna menjangkau kelompok warga yang memiliki keterbatasan akses internet atau literasi digital.

Strategi komunikasi *Public Relations* yang dijalankan juga dirancang untuk tidak bersifat satu arah semata. Pemerintah desa berupaya membangun ruang dialog dan interaksi dua arah yang interaktif, sehingga masyarakat tidak sekadar menjadi penerima informasi pasif, melainkan memiliki kesempatan untuk bertanya, meminta penjelasan rinci mengenai program desa, hingga menyampaikan kritik dan saran secara langsung dalam forum-forum resmi maupun tatap muka.

Kendati berbagai upaya dan saluran komunikasi telah dioptimalkan secara maksimal, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transparansi informasi publik ini masih menghadapi sejumlah tantangan sosiologis di tingkat tapak. Perbedaan tingkat keaktifan, latar belakang sosial, dan kesenjangan literasi digital membuat sebagian masyarakat belum sepenuhnya terjangkau oleh informasi berbasis daring. Akibatnya, sebagian warga masih sangat bergantung pada jaringan komunikasi informal, seperti perantara pengurus RT/RW atau informasi lisan dari tetangga sekitar, yang menunjukkan bahwa efektivitas kehumasan desa sangat ditentukan oleh kombinasi adaptasi teknologi dan pendekatan kultural yang berkelanjutan.

Pembahasan

Pembahasan mendalam mengenai hasil penelitian ini menegaskan bahwa peran *Public Relations* (PR) Pemerintah Desa Cigentur, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, dijalankan secara komprehensif. Peran tersebut tidak hanya diposisikan sebagai fungsi administratif untuk menyebarkan pesan satu arah, melainkan sebagai fungsi strategis yang menempatkan pemerintah desa sebagai jembatan penghubung dan fasifikator dialog antara lembaga birokrasi dan warga. Dalam praktiknya, penyampaian informasi publik dilakukan melalui strategi multisaluran yang secara cermat memadukan pemanfaatan media digital dan komunikasi langsung guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang memiliki karakteristik, tingkat literasi digital, serta kebiasaan akses informasi yang sangat beragam.

Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)
Journal page is available to https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijosse/index
Email: admin@jurnalcenter.com

Dari sisi penyampaian informasi, Pemerintah Desa Cigentur berupaya memaksimalkan platform berbasis teknologi seperti website resmi desa, akun media sosial Instagram, serta grup komunikasi WhatsApp. Penggunaan media digital ini terbukti efektif dalam mempercepat diseminasi informasi terkait program pembangunan, kegiatan pemerintahan, dan layanan publik kepada warga yang akrab dengan gawai, sehingga mereka dapat mengakses informasi secara fleksibel tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Namun demikian, pemerintah desa menyadari bahwa ketersediaan media digital belum sepenuhnya menjangkau seluruh warga secara merata akibat adanya kesenjangan literasi teknologi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, komunikasi langsung tetap dipertahankan secara konsisten melalui rapat koordinasi, sosialisasi, kegiatan Jumat Keliling, serta jaringan komunikasi informal di tingkat RT dan RW.

Lebih lanjut, implementasi transparansi informasi di Desa Cigentur diperkuat melalui penerapan konsep komunikasi dua arah yang interaktif. Pemerintah desa secara aktif membuka ruang partisipasi bagi masyarakat agar tidak hanya berperan sebagai penerima informasi pasif, melainkan juga memiliki hak untuk bertanya, memberikan tanggapan, serta memahami rincian kebijakan secara transparan. Forum formal seperti Musyawarah Desa (Musdes) menjadi sarana krusial yang mempertemukan langsung aparatur pemerintah dengan warga, sehingga proses pertukaran informasi dapat berjalan secara terbuka, dialogis, dan akuntabel. Melalui forum ini, potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat ikut serta mengawal jalannya pembangunan desa.

Strategi komunikasi *Public Relations* yang diterapkan juga sangat berorientasi pada upaya penyesuaian kondisi sosiologis masyarakat. Dengan menyadari bahwa sebagian warga masih mengandalkan informasi lisan dari tetangga atau pengurus lingkungan sekitar, pemerintah desa merancang pola komunikasi yang inklusif. Pendekatan ini memastikan bahwa warga yang memiliki keterbatasan akses internet tetap mendapatkan hak informasi yang setara melalui jalur tatap muka dan kegiatan kemasyarakatan yang tersebar di berbagai dusun.

Terakhir, bentuk responsivitas Pemerintah Desa Cigentur terhadap aspirasi dan kebutuhan informasi warga tercermin dari kesigapan aparatur dalam mendengarkan dan menindaklanjuti berbagai masukan yang masuk. Baik melalui kolom komentar media digital, interaksi dalam grup WhatsApp, maupun usulan langsung di ruang Musdes, pihak desa berupaya memberikan tanggapan yang solutif. Sinergi antara pemanfaatan teknologi modern dan pendekatan kultural tatap muka ini berhasil memperkuat hubungan yang harmonis, meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*), serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di Desa Cigentur.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Public Relations Pemerintah Desa Cigentur dalam Mewujudkan Transparansi Informasi Publik, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Cigentur berperan dalam menyampaikan informasi publik melalui berbagai saluran komunikasi. Penyampaian informasi dilakukan melalui komunikasi langsung seperti sosialisasi, rapat, Musyawarah Desa, dan kegiatan Jumat Keliling, serta melalui media informasi seperti baliho, grup WhatsApp, website, dan Instagram. Penggunaan berbagai saluran tersebut dilakukan untuk menyesuaikan perbedaan akses dan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi.
2. Strategi komunikasi Pemerintah Desa Cigentur dalam mewujudkan transparansi informasi publik dilakukan melalui komunikasi yang terbuka dan penggunaan berbagai media. Pemerintah desa tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penjelasan dan menyampaikan pendapat. Komunikasi langsung melalui kegiatan desa menjadi salah satu cara untuk membangun keterbukaan dan hubungan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.
3. Dalam komunikasi dengan masyarakat, Pemerintah Desa Cigentur menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan informasi melalui perangkat desa, RT/RW, forum Musyawarah Desa, maupun komunikasi langsung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan tidak hanya berlangsung dalam bentuk penyampaian informasi dari

Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)
Journal page is available to https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijosse/index
Email: admin@jurnalcenter.com

pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan informasinya. Dengan demikian, aspek komunikasi dua arah dalam penelitian ini terlihat melalui adanya proses penyampaian dan penerimaan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Secara keseluruhan, peran Public Relations Pemerintah Desa Cigentur dalam mewujudkan transparansi informasi publik dilakukan melalui penyampaian informasi, penggunaan berbagai saluran komunikasi, serta keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat**.** Meskipun demikian, perbedaan akses dan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi menunjukkan pentingnya penggunaan berbagai saluran komunikasi secara berkelanjutan agar informasi publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

5. DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2019). *Effective public relations* (11th ed.). Pearson Education.

Edy Maskhuri. (2022). Peran humas dalam meningkatkan pelayanan informasi di desa. *Jurnal Tata Kelola Desa*.

Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing public relations*. Holt, Rinehart and Winston.

Haryanti, S., & Rusfian, E. Z. (2024). Peran humas pemerintah dalam membangun informasi publik melalui komunikasi partisipatif. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(2), 145–158.

Karinda, et al. (2024). Strategi komunikasi publik dalam keterbukaan informasi desa. *Jurnal Komunikasi*.

Kurniawan, A., & Wijoyo, S. (2025). Strategic government public relations in strengthening public trust. *International Research Journal of Business Studies*, 18(1), 33–47.

Mardiasmo. (2021). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. ANDI.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Pandiangan, C. U. A., & Ratnasari, E. (2023). Government public relations dan transparansi informasi publik. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 7(1), 1–14.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Rusfian, E. Z., & Nugroho, A. (2023). Digitalisasi komunikasi publik pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 21(2), 101–115.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Syahrir, R. N. A. (2025). Strategi komunikasi pemerintah desa berbasis dialog dan budaya lokal. *Prosiding AICCON*, 3(1), 55–67.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.